



Media Title	Bisnis Indonesia	
Date	8 Oktober 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	28	Article Size
Journalist	Anggara Fernando	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

► IMPLEMENTASI TOL LAUT

Bappenas Ingatkan Jokowi

JAKARTA—Kalangan ahli di Bappenas mengingatkan pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla agar jangan sampai mengulangi kegagalan dalam mengimplementasikan gagasan tol laut karena dapat merugikan perekonomian.

Anggara Fernando
redaksi@bisnis.co.id

Dedi Masykur Riyadi, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), menyatakan pemerintahan baru harus belajar dari pengalaman membangun tol laut Pelabuhan Sabang.

Walhasil, setelah dilakukan pemusatan jasa pelabuhan di Sabang, Daerah Istimewa Aceh, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang digembar-gemborkan justru hanya semu.

Menurutnya, pembukaan Pelabuhan Sabang pada 2000 menjadi kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas saat itu diyakini dapat memperkuat ekonomi kawasan.

Tingginya arus barang yang datang ke Sabang dan komponen modal, pemerintah berasumsi hal itu akan mengundang para pengusaha untuk membangun industri pengolahan di Sabang.

Namun, harapan itu akhirnya pupus dan yang terjadi justru melahirkan para makelar yang mengambil selisih keuntungan dari mekanisme perdagangan. Sumbangan terhadap pertumbuhan kawasan yang kompetitif justru minim.

"[Konsep tol laut] harus dilihat ulang. Seharusnya, konsep tol

laut dibangun dengan mengedepankan [pembangunan] kawasan produksi, bukan [sekadar] menjadikan kota dagang," kata Dedi, Selasa (7/10).

Menurutnya, yang harus terus dikedepankan pemerintah adalah memperlancar arus barang dan orang. Adapun, opsi memindahkan logistik dari darat ke laut sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Namun, bila tol laut tak diimbangi dengan pengembangan kawasan produksi, hal itu akan menambah masalah baru.

"Misalnya di Cirebon. Pelabuhanannya sepi. Barang apa yang mau dijual di sana? Tidak ada. Jadi mesti bareng. Tempat lain punya potensi tinggi tetapi mengandalkan jalan darat, misalnya barang tambang," kata Dedi.

BERBESAR HATI

Menurut Dedi, pemerintahan baru harus berbesar hati untuk melihat konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang didesain untuk

► Tol laut harus dibangun dengan mengedepankan pembangunan kawasan produksi bukan sekadar kota dagang.

► Jika Jokowi merombak MP3EI dengan perencanaan tol laut, itu akan menyita waktu lebih lama.

mengedepankan koridor berbasis produksi.

Jika harus merombak MP3EI dengan perencanaan tol laut, hal itu akan memakan waktu yang lebih lama lagi. "Kalau membikin lagi yang baru kapan kita mulai [bekerja]," jelasnya.

Konsep tol laut diperkenalkan oleh pemerintahan Joko Widodo yang salah satu tujuannya ingin memperlancar arus barang dari barat ke timur secara reguler.

Dengan rute mirip pendulum itu, diharapkan masing-masing kawasan akan tumbuh merata karena jalur distribusi yang lancar dan biaya logistik menjadi turun. Pemerintah juga akan menjadikan kawasan timur sebagai pintu masuk barang impor sehingga biaya kapal yang biasanya kosong dari timur akan terisi penuh.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setjadi mengatakan implementasi konsep tol laut harus dilaksanakan secara bijak dengan melibatkan pelayaran nasional yang selama ini telah berkontribusi membangun dan menjalankan sistem transportasi laut Indonesia.

Adapun, implementasi tol laut akan meningkatkan volume pergerakan barang antarwilayah, termasuk pergerakan dari dan ke wilayah-wilayah yang dilayani pelabuhan rakyat. □

Sasaran Prioritas Penguatan Konektivitas Nasional

Target	Target 2010	Target RPJM 2019 (*)	Target Visi misi Jokowi
Jalan Baru	34.570 km	5.200 km	2.000 km
Kereta Api	5.434 km	2.278 km	-
Perhubungan Laut	33 Pel Utama + 214 pengumpul	6 pelabuhan utama/ 23 pengumpul	Belawan, Tj Priok, Tj Perak, Makassar, dan Bitung sebagai Hub Internasional
Perhubungan Udara	242 bandara	15 lokasi bandara baru	10 bandara baru
Perhubungan darat	17 Kota Bus Rapid Transit	34 kota	Sistem transportasi massal perkotaan
Pos dan informatika	85% kab/kota terlayani	100 % kab/kota	Penataan kembali frekuensi penyiaran

Sumber: Bappenas, Diolah

BISNIS/HUSIN PARAPAT